

**ANALISIS KINERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN
TINGKAT KEMANDIRIAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH:
STUDI KASUS KABUPATEN BENGKALIS**

Nurul Amin, SE., MM

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Syariah Bengkalis
Jalan Poros Sungai Alam - Selat Baru, Bengkalis 28751
Telp. (0766) 21550 Fax. (0766) 700 7134

Abstrak

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggambarkan dan menganalisis data yang diperoleh. Objek penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan judul penelitian “Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis. Alat analisis yang digunakan untuk mengukur kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis adalah rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, rasio efisiensi, rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Hasil analisis rasio kinerja keuangan daerah dan tingkat kemandirian Kabupaten Bengkalis pada tahun 2010-2014 menunjukkan bahwa tingkat keuangan kemandirian yang instruktif dengan rata-rata sebesar 18,76%, rasio efektivitas sebesar 105% yang berarti sangat efektif, rasio efisiensi yang bersifat efisien dengan rata-rata sebesar 4,89%, rasio aktivitas belanja rutin terhadap APBD sebesar 76,8% lebih besar dibandingkan rasio aktivitas belanja pembangunan terhadap APBD yang hanya memiliki rata-rata sebesar 22,2% serta rasio pertumbuhan terdiri dari PAD sebesar 26,58%, pendapatan sebesar 15,18%, belanja rutin sebesar 16,25%, dan belanja pembangunan sebesar 17,51%. Dari hasil analisis rasio keuangan daerah dapat disimpulkan bahwa secara umum kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis yang terus membaik. Hal tersebut dapat terlihat dari beberapa rasio kinerja keuangan daerah yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas, dan rasio efisiensi yang terus meningkat dan berpengaruh baik terhadap kemandirian daerahnya meskipun ada beberapa rasio kinerja keuangan daerah yang terus menurun atau memiliki trend negatif seperti rasio aktivitas dan rasio pertumbuhan. Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran bahwa sebaiknya pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada.

Kata Kunci: Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah, Tingkat Kemandirian dan Otonomi Daerah

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menyelenggarakan pemerintah daerah sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah yang mengatur dan mengurus urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, pemerintahan daerah memiliki wewenang untuk menggali pendapatan dan melakukan peran alokasi secara mandiri dalam menetapkan prioritas pembangunan. Adapun tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal menurut UU No. 32 Tahun 2005 adalah untuk meningkatkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan fiskal pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Dalam otonomi daerah terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibandingkan sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (*Desentralisasi Fiskal*). Aspek kedua yaitu di sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan atau *Financing Reform*. Maka untuk mencapai pembangunan suatu negara diperlukan adanya pembiayaan dengan sistem pembagian keuangan yang adil, proporsional, demokratis, transparan, dan efisien. Pembiayaan suatu daerah diperoleh dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang disusun setiap Tahun oleh pemerintah daerah beserta satuan kerjanya guna memenuhi pelayanan publik. Sehingga penting bagi pemerintah daerah untuk menaruh perhatian yang lebih besar terhadap kinerja pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif atau memenuhi prinsip *value for money* serta partisipatif, transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi serta kemandirian suatu daerah. Dengan demikian maka suatu daerah yang kinerja keuangannya dinyatakan baik berarti daerah tersebut memiliki kemampuan keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah. Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian sebagai berikut: bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis berdasarkan analisis Rasio Keuangan pada APBD Kabupaten Bengkalis Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis.

B. TINJAUAN TEORI

Desentralisasi dan Otonomi Daerah Desentralisasi dan otonomi daerah secara terus menerus mengalami perkembangan. Berakhirnya Orde Baru menuntut reformasi pemerintahan dalam segala aspeknya, maka mulai tahun 1999 diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan terakhir diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Glosary Word Bank dikemukakan bahwa desentralisasi adalah “A process of transferring responsibility, authority, and accountability for specific or broad management function to lower levels within

an organization, system or program“. Dalam konteks ini, desentralisasi diartikan sebagai sebuah proses pemindahan tanggung jawab, kewenangan dan akuntabilitas mengenai fungsi-fungsi manajemen secara khusus ataupun luas kepada aras yang lebih rendah dalam suatu organisasi, sistem atau program. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, Otonomi Daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan. Dari definisi yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa dalam desentralisasi terjadi proses penyerahan sejumlah kekuasaan/kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah daerah secara otonom melalui kelembagaan yang dimiliki sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Untuk dapat menjalankan kekuasaan/kewenangan yang dimiliki, pemerintah daerah harus memiliki sumber-sumber daya yang cukup diantaranya adalah sumberdaya keuangan yang memadai.

Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah Salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah. Salah satunya yaitu pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu kepada kepentingan publik, hal ini tidak saja terlihat dari besarnya porsi penganggaran untuk kepentingan publik, tetapi pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pelaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Seiring dengan diterapkannya Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah dan Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi pergeseran dan pengelolaan keuangan publik di Indonesia. Oleh karena itu, dilaksanakan reformasi segala bidang meliputi reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik terutama yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan publik demi untuk mendukung terciptanya *good governance*. Begitu juga Peraturan pemerintah No 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mendefinisikan Keuangan Daerah sebagai semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. yang dimaksud daerah di sini adalah pemerintah daerah yang merupakan daerah otonom berdasarkan peraturan perundang-undangan.

APBD Dalam Era Otonomi Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Mamesah (1995:20) dalam Halim (2007: 16) adalah rencana operasional keuangan Pemerintah Daerah, di mana di satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam satu tahun anggaran tertentu, dan di pihak lain menggambarkan perkiraan penerimaan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran dimaksud. Di Era (pasca) reformasi, bentuk APBD mengalami perubahan cukup mendasar. Bentuk APBD yang baru didasari pada peraturan-peraturan mengenai Otonomi Daerah terutama UU No. 22/1999 yang telah diubah menjadi UU No. 32/2004 yang telah diubah menjadi UU No. 33/2004, PP No. 105/2000. Akan tetapi, karena untuk menerapkan peraturan yang baru diperlukan proses, maka untuk menjembatani pelaksanaan

keuangan daerah pada kedua era tersebut dikeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No.903/2375/SJ tanggal 17 November 2001. Peraturan tersebut dikeluarkan untuk mengakomodasi transisi dari UU No. 5/1974 ke UU No. 22/1999 yang kini telah diubah menjadi UU No. 32/2004. Peraturan-peraturan di era reformasi keuangan daerah mengisyaratkan agar laporan keuangan makin informatif. Untuk itu, dalam bentuk yang baru, APBD diperkirakan tidak akan terdiri dari dua sisi dan akan dibagi menjadi tiga bagian yaitu Penerimaan, Pengeluaran dan Pembiayaan. Pembiayaan merupakan kategori yang baru yang belum ada di era pra reformasi. Adanya pos pembiayaan merupakan upaya agar APBD makin informatif, yaitu memisahkan pinjaman dari pendapatan daerah.

Kinerja Keuangan Daerah Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah berupa perhitungan APBD. Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan menurut (Halim, 2002:126). Beberapa rasio keuangan yang dapat digunakan untuk mengukur akuntabilitas pemerintah daerah menurut (Halim, 2002:128). Yaitu rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas dan efisien keuangan daerah, rasio aktivitas, dan rasio pertumbuhan.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah dan demikian pula sebaiknya menurut Halim, (2002). Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Rasio Efisiensi adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Rasio Aktivitas, ratio ini menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan secara optimal. Semakin tinggi persentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin berarti persentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan untuk sarana prasarana ekonomi masyarakat cenderung semakin kecil.

Rasio Pertumbuhan (*growth ratio*) mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode berikutnya. Dengan diketahuinya pertumbuhan untuk masing-masing komponen sumber pendapatan dan pengeluaran, dapat digunakan untuk mengevaluasi potensi-potensi mana yang perlu mendapat perhatian.

C. METODE PENELITIAN

Teknik Analisis Data Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini melalui tahap-tahap sebagai berikut:

1. Menghitung rasio Kemandirian keuangan daerah berdasarkan APBD
2. Menghitung rasio Efektifitas berdasarkan APBD
3. Menghitung rasio Efisiensi berdasarkan APBD
4. Menghitung rasio Aktivitas terdiri dari
5. Menghitung rasio Pertumbuhan terdiri dari

D. PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Dalam pembahasan hasil penelitian ini akan dibahas mengenai bagaimana kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dengan menggunakan Analisis Rasio terhadap APBD pada tahun anggaran 2010-2014. Aspek-aspek tersebut dapat diketahui dengan melakukan analisis rasio sebagai berikut:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan Kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber yang diperlukan oleh daerah.

Tabel 1 : Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Bantuan Pemerintah (DAK, DAU & DBH) Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	PAD (Rp) Bantuan	Pemerintah Pusat (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2010	87.115.734.710,46	507.367.762.441,00	17,17	Instruktif
2011	83.403.547.594,61	579.412.291.881,00	14,39	Instruktif
2012	92.476.383.151,21	599.009.597.671,00	15,43	Instruktif
2013	113.490.265.808,78	626.023.144.999,00	18,12	Instruktif
2014	185.818.563.982,76	646.871.523.364,00	28,72	Konsultatif

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Bengkalis dan BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)

Berdasarkan perhitungan rasio kemandirian keuangan diatas bahwa kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat pada tahun anggaran 2010 s/d 2014 masih cukup rendah rata-rata 18,76% kurang dari 50%, yaitu pada tahun 2010 sebesar 17,17%, pada tahun 2011 sebesar 14,39%, tahun 2012 sebesar 15,43%, tahun 2013 sebesar 18,12% dan tahun 2014 sebesar 28,72%. Kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis kurang baik meskipun pada tahun

2012 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan kembali dari 14,39% menjadi 15,43% atau 1,04% dari tahun 2011, namun pada tahun 2014 rasio kemandirian keuangan mengalami kenaikan dari 18,12% pada tahun 2013 menjadi 28,72% pada tahun 2014. Kenaikan rasio kemandirian keuangan pada tahun 2012 disebabkan karena turunnya realisasi atas pendapatan non PAD pada tahun 2012 seperti dari hasil bukan pajak/ sumber daya alam dari sektor iuran hak pengusaha hutan yang pada tahun 2011 terealisasi sebesar Rp 438.342.980,00 sedang pada tahun 2012 terealisasi hanya Rp 288.392.730,00 dan pertambangan minyak bumi pada tahun 2011 terealisasi Rp 3.584.920.111,00 turun menjadi Rp 1.858.366.537,00 pada tahun 2012. Meningkatnya rasio kemandirian keuangan pada tahun 2012 hingga tahun 2014 disebabkan karena adanya peningkatan dari pendapatan non PAD yaitu karena meningkatnya pendapatan dari DAK karena adanya DAK non reboisasi seperti DAK bidang jalan, DAK air bersih, DAK lingkungan hidup dan DAK pertanian.

Rasio Efektivitas Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas, menggambarkan kemampuan daerah yang semakin baik.

Tabel 2: Analisis Rasio Efektivitas Target Terhadap Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2010	82.875.966.418,00	87.115.734.710,46	105	Sangat Efektif
2011	82.213.442.771,93	83.403.547.594,61	101	Sangat Efektif
2012	92.772.122.460,02	92.476.383.151,21	99	Efektif
2013	104.802.485.741,16	113.490.265.808,78	108	Sangat Efektif
2014	162.332.588.459,55	185.820.893.982,76	114	Sangat Efektif

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)

Dari perhitungan rasio efektivitas bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis cukup baik/efektif karena realisasi PAD diatas 100% yaitu rata-rata dari tahun 2010 s/d 2014 sebesar 105,4% seperti pada tahun 2010 sebesar 105%. Sedangkan pada tahun 2011 dan tahun 2012 kurang baik karena realisasinya menurun dan dibawah target yang ditetapkan yaitu sebesar 101% pada tahun 2012 turun lagi dibawah target sebesar 99% pada tahun 2012, hal tersebut dikarenakan menurunnya realisasi pada beberapa pos-pos PAD seperti pajak daerah dan retribusi. Pada tahun 2012 dan tahun 2013 efektivitas pengelolaan keuangan membaik yaitu sebesar 108% pada tahun 2013 kemudian naik pada tahun 2014 sebesar 114%. Realisasi rasio efektivitas tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi rasio efektivitas pada tahun 2012 karena pada tahun 2013 dan tun 2014 semua pos-pos PAD realisasinya diatas 100%.

Rasio Efisiensi Rasio efisien adalah rasio yang menggambarkan perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima. Semakin kecil rasio

efisien, maka semakin efisien, begitu pula sebaliknya. Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dalam menjalankan tugas dikategorikan efisien apabila rasio yang dicapai minimal 1 (satu) atau 100 persen.

Tabel 3: Analisis Rasio Efisiensi Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Biaya yang Dikeluarkan untuk Memungut PAD Propinsi Riau Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi Penerimaan PAD (Rp)	Biaya yang dikeluarkan untuk memungut PAD (Rp)	Hasil (%)	Keterangan
2010	87.115.734.710,46	3.326.983.096,00	1,79	EFISIEN
2011	83.403.547.594,61	4.716.173.206,00	4,15	EFISIEN
2012	92.476.383.151,21	4.202.378.756,00	4,54	EFISIEN
2013	113.490.265.808,78	4.254.088.852,00	5,10	EFISIEN
2014	185.820.893.982,76	7.771.754.600,81	8,92	EFISIEN

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)

Dari perhitungan rasio efisiensi dapat dilihat bahwa efisiensi pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bengkalis dimana pemerintah memberikan dana insentif untuk merealisasikan PAD secara maksimal sehingga mampu melakukan pelaksanaan anggarannya daerahnya baik/efisien meskipun terlihat rasio efisiensi Kabupaten Bengkalis setiap tahun mengalami peningkatan. Seperti pada tahun 2010 sebesar 1,79%, tahun 2011 sebesar 4,15%, pada tahun 2012 sebesar 4,54%, pada tahun 2013 dan tahun 2014 rasio efisiensi mengalami peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar 5,10 pada tahun 2013 dan 8,92% pada tahun 2014. Dikarena pada tahun 2013 dan tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Bengkalis menambah anggaran dialokasikan untuk biaya insentif yaitu pada pos retribusi daerah. Secara keseluruhan rasio efisiensi Kabupaten Bengkalis memiliki rata-rata sebesar 4,89% dengan demikian menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis efisien dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal.

Rasio Aktivitas Rasio Aktifitas menggambarkan bagaimana pemerintah daerah dalam memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin atau pada belanja pembangunan secara optimal. Rasio aktifitas dihitung sebagai berikut:

Tabel 4: Analisis Rasio Aktivitas Total Belanja Rutin dan Pembangunan Terhadap Total APBD Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	APBD (Rp) Belanja Rutin (Rp)	Belanja Pembangunan (Rp)	Belanja Rutin Terhadap APBD (%)	Belanja Pembangunan Terhadap APBD (%)
2010	649.952.517.958,55	495.905.673.319,02	154.046.844.639,53	76,23
2011	756.081.751.567,41	569.096.287.902,33	186.985.463.665,08	75,24
2012	840.134.950.348,84	610.189.698.412,75	229.945.251.936,09	72,27
2013	1.018.990.676.790,37	803.172.227.949,01	215.818.448.841,36	78,21
2014	1.118.652.929.915,68	938.531.103.372,14	180.121.826.543,54	83,16

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)

Dari perhitungan rasio aktivitas terlihat bahwa sebagian besar dana dialokasikan untuk belanja rutin sehingga rasio aktivitas terhadap APBD masih sangat rendah. Dimana selama kurun waktu 5 tahun yaitu pada tahun 2010 s/d 2014 rata-rata rasio aktivitas belanja rutin lebih besar dibandingkan dengan rasio aktivitas belanja pembangunan yaitu sebesar 76,8% untuk rasio aktivitas belanja rutin, sedangkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembangunan hanya sebesar 22,2%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis lebih memprioritaskan belanjanya pada belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan. Sehingga diperlukan minimalisasi anggaran guna dialokasikan untuk belanja modal/pembangunan untuk kepentingan masyarakat.

Rasio Pertumbuhan Rasio pertumbuhan menunjukkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang telah dicapai dari periode ke periode.

Tabel 5: Data Analisis Rasio Pertumbuhan Realisasi PAD, Realisasi Penerimaan Pendapatan, Realisasi Belanja Rutin, dan Realisasi Belanja Pembangunan Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014

Tahun Anggaran	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja Rutin (Rp)	Realisasi Belanja Pembangunan (Rp)
2010	87.115.734.710,46	644.755.574.122,46	461.645.273.818,05	150.313.662.647,00
2011	83.403.547.594,61	724.328.420.101,61	534.589.559.092,23	152.745.939.302,00
2012	92.476.383.151,21	798.840.456.272,21	582.298.023.573,91	226.830.162.623,00
2013	113.490.265.808,78	988.288.099.524,78	762.543.079.954,95	205.424.565.364,64
2014	185.818.563.982,76	1.102.655.771.801,76	885.534.264.921,14	162.696.857.907,88

Sumber: Data diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis

Tabel 5 merupakan data analisis rasio pertumbuhan realisasi pad, realisasi penerimaan pendapatan, realisasi belanja rutin, dan realisasi belanja pembangunan Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2010-2014. Sedangkan Tabel 6 merupakan hasil analisis rasio pertumbuhan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2010-2014

Tabel 6: Hasil Analisis Rasio Pertumbuhan APBD Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2010-2014

No	Tahun	Rasio PAD	Rasio Pertumbuhan Pendapatan	Rasio Pertumbuhan Belanja Rutin	Rasio Pertumbuhan Belanja Pembangunan
1	2010	39,80%	18,04%	9,48%	67,67%
2	2011	-4,2%	12,34%	15,80%	1,61%
3	2012	10,87%	10,28%	8,92%	48,50%
4	2013	63,73%	23,71%	16,12%	-20,79%
5	2014	22,72%	11,57%	30,95%	-9,43%

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, Dan. Aset Kabupaten Bengkalis serta BPKAD Kabupaten Bengkalis (diolah)

Pertumbuhan APBD Kabupaten Bengkalis tahun anggaran 2010 s/d 2014 menunjukkan pertumbuhan positif terutama pertumbuhan PAD mengalami peningkatan meskipun pada tahun 2011 sempat mengalami penurunan sebesar -4,2% dikarenakan pada tahun 2011 Pemerintah Kabupaten Bengkalis tidak mampu merealisasikan pendapatan asli daerahnya (PAD) secara maksimal akibat beberapa pos PAD yang tidak dapat berkontribusi secara maksimal ditahun 2011. Namun di tahun-tahun selanjutnya rasio pertumbuhan PAD Kabupaten Bengkalis mengalami peningkatan kembali. Pertumbuhan pendapatan Kabupaten Bengkalis berfluktuatif dimana mengalami penurunan rasio pertumbuhan dari tahun 2010 s/d 2012 yaitu dari 18,04% pada tahun 2010 turun menjadi 10,28% pada tahun 2012. Kemudian naik pada tahun 2013 sebesar 23,71% kemudian turun kembali sebesar 11,57%. Selain pendapatan, pertumbuhan belanja pemerintah Kabupaten Bengkalis yang terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan juga mengalami pertumbuhan. Dimana pada tahun 2011 rasio pertumbuhan belanja rutin lebih tinggi yaitu sebesar 15,80% dimana pada tahun sebelumnya hanya sebesar 9,48% pada tahun 2010. Kemudian mengalami penurunan pada tahun 2012 sebesar 8,92%. Selanjutnya pada tahun 2013 dan tahun 2014 mengalami kenaikan yang signifikan yaitu sebesar 16,12% pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 naik sebesar 30,95%. Hal tersebut disebabkan karena semua pos-pos belanja rutin seperti belanja administrasi umum, belanja bagi hasil, dan bantuan keuangan serta belanja tidak disangka mengalami kenaikan akibat pertumbuhan belanja pembangunan yang menurun. Kesimpulannya bahwa rasio pertumbuhan kinerja pengelolaan keuangan Kabupaten Bengkalis baik karena Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu meningkatkan pertumbuhan PAD dan pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu meningkatkan pendapatan daerahnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis memiliki rasio pertumbuhan rasio belanja yang kurang baik dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih memprioritaskan belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan.

Hubungan Variabel Kinerja Keuangan Daerah dengan Tingkat Kemandiri Daerah, Tingkat Efektivitas dan Efisiensi, Tingkat Aktivitas dan Tingkat Pertumbuhan Daerah. Dari hasil analisis data dan pembahasan maka diperoleh adanya hubungan antara variabel kinerja keuangan daerah dengan beberapa variabel berikut yaitu variabel tingkat kemandirian daerah, tingkat efektivitas dan efisiensi, tingkat aktivitas dan tingkat pertumbuhan daerah. Hubungan setiap variabel tersebut tertera dalam tabel berikut:

Tabel 7: Prosentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan.

Tahun	Rasio Kemandirian Daerah (%)	Rasio Efektivitas (%)	Rasio Efisiensi (%)	Rasio Aktivitas	Rasio Pertumbuhan			
					PAD (%)	Pendapatan (%)	Belanja Rutin (%)	Belanja Pembangunan (%)
2010	17,17	105	1,79	76	39,8	18,04	9,48	67,67
2011	14,39	101	4,15	75	-4,2	12,34	15,8	1,61
2012	15,43	99	4,54	72	10,87	10,28	8,92	48,5
2013	18,12	108	5,1	78	22,72	23,71	16,12	-20,79
2014	28,72	114	8,92	83	63,73	11,57	30,95	-9,43

Sumber: Analisis Data Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Rasio Aktivitas dan Rasio Pertumbuhan (data diolah)

Bahwasanya secara keseluruhan hubungan kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis dengan beberapa variabel seperti tingkat kemandirian daerah memiliki hubungan yang instruktif dikarenakan tingkat rasio kemandirian keuangan daerahnya memiliki rata-rata 18,76% namun demikian Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih bisa dikatakan berusaha untuk mandiri terlihat dari meningkat setiap tahunnya. Selain berusaha untuk mandiri Pemerintah Kabupaten Bengkalis sangat efektif dalam merealisasikan pendapatan asli daerahnya terlihat dari 9 rata-rata rasio efektifnya sebesar 105,4%. Selain efektif kinerja pengelolaan keuangan daerah dan tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis efisien dalam memberikan anggaran yang dialokasikan untuk biaya intensif untuk memungut pendapatan asli daerahnya secara maksimal terlihat dari rata-rata rasio efisiensinya sebesar 4,89%. Namun Pemerintah Kabupaten Bengkalis masih memprioritaskan anggaran belanjanya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan dimana rata-rata rasio aktivitas belanja rutin sebesar 76,8% yang lebih besar dibandingkan rata-rata rasio aktivitas belanja pembanguana yang hanya sebesar 22,2%. Selanjutnya rasio pertumbuhan Kabupaten Bengkalis memiliki kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik pada pertumbuhan PAD, pendapatan daerah dan belanja rutin terbukti dari rasio pertumbuhan yang mengalami trend positif, sedangkan kinerja pengelolaan keuangan daerah untuk pembiayaan belanja pembangunan masih sangat rendah karena rasio pertumbuhannya mengalami tren negatif. Maka Pemerintah Kabupaten Bengkalis diharapkan dapat meminimalisasikan an anggaran daerahnya untuk belanja rutin, dan mengalokasikannya untuk belanja pembangunan agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin dengan tersedianya sarana dan prasarana ekonomi.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, rata-rata kinerja pengeloalan keuangan dan tingkat kemandirian daerah Kabupaten Bengkalis di era otonomi daerah berdasarkan analisis ratio keuangan adalah baik. Terlihat dari tingkat rasio kemandirian keuangan daerah Kabupaten Bengkalis bersifat instruktif karena memiliki rata-rata 18,76% (<25%), rasio efektivitas prosentase rata-ratanya sebesar 105,4% yang berarti pemungutan pendapatan asli daerah cenderung stabil atau sangat efektif, rasio efisiensi Kabupaten Bengkalis prosentase rata-ratanya dalam memberikan biaya insentif untuk memungut PAD secara maksimal, dan rasio aktivitas Pemerintah Kabupaten Bengkalis di era otonomi daerah menunjukkan pemerintah masih memprioritaskan belanja daerahnya untuk belanja rutin dibandingkan untuk belanja pembangunan, serta rasio pertumbuhan Kabupaten Bengkalis menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu mempertahankan kinerjanya dalam mengelola keuangan daerahnya terlihat dari rasio pertumbuhan yang mengalami trend positif (PAD dan Pendapatan Daerah), meskipun ada juga yang mengalami trend negatif (Belanja Daerah).

Saran Melihat permasalahan yang ada dan dengan memperhatikan hasil dari analisis terhadap ratio pengelolaan keuangan terhadap APBD Kabupaten Bengkalis serta kesimpulan diatas, maka saran-saran yang mungkin berguna bagi

peningkatan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bengkalis antara lain sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bengkalis harus mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau dengan meminta wewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang masih dikuasi oleh Pemerintah Pusat / Propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya (PAD).
2. Diharapkan Pemerintah Kabupaten Bengkalis mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bengkalis dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia baik aparatur daerah maupun masyarakat melalui memingkatkan pembiayaan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang menunjang kesejahteraan masyarakat serta diimbangi dengan perluasan lapangan kerja seperti merevitalisasi pertanian, meningkatkan kompetensi tenaga kerja, meningkatkan produktivitas dan akses UKM kepada daya produktif, dan meningkatkan ketahanan pangan agar pendapatan masyarakat Kabupaten Bengkalis meningkat sehingga retribusi dan pajak yang dibayar masyarakat juga akan meningkat
3. Pemerintah Kabupaten Bengkalis perlu meningkatkan pembangunann serta penyediaan sarana dan prasarana umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Bengkalis dan untuk menarik investor. Dimana pemerintah juga harus selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan efisiensi.

DAFTAR PUSTAKA

-, UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah
-, UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
-, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
-, UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
-, UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah
- Halim, A. 2008. *Akuntansi Keuangan Daerah, Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat, Jakarta.
- Hidayat. S. 2008. *Desentralisasi Dan Otonomi Daerah Dalam Perspektif State-Society Relation*. Jurnal Politik, Vol. 1. Universitas Nasional. Jakarta
- Landiyanto. E. A, 2005. *Kinerja Keuangan dan Strategi Pembangunan Kota di Era Otonomi Daerah: Studi Kasus Kota Surabaya*. Jurnal Akuntansi. Universitas Erlangga. Surabaya. Vol. 1
- Mamesah. 1995. *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. PT Gramedia Pustaka, Jakarta
- Mardiasmo. 2004. *Akuntansi Sektor Publik*. Andi. Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Andi. Yogyakarta
- Mente. L. 2010. *Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dalam Menunjang Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kota Makassar*. Jurnal Ekonomi. Universitas Muslim Indonesia. Makassar. Vol.11
- Nasir dan Darlis. 2012. *Analisa Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Al Fino Losa. Universitas Negeri Padang. Padang. Vol 1 Sularso. H dan Restianto. Y. E. 2011.
- Sidik. M. 2002. *Optimalisasi Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Peningkatan Kemampuan Keuangan Daerah*. Jurnal Orasi Ilmiah. STIA LAN. Bandung.
- Wayong. J. 1987. *Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: Ichtiar. Wasistiono. S. 2010. Menuju Desentralisasi Berkesinambungan. Jurnal Ilmu Politik AIPI. IPDN.
- Wahyuni. N, 2007. *Analisis Rasio Untuk Mengukur Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bengkalis*. Jurnal Akuntansi. Bengkalis